

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kegiatan organisasi sektor publik dan organisasi nirlaba lainnya terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era informasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan yang sangat penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggungjawaban maupun manajerial.

Saat ini, lembaga-lembaga pemerintah sebagai organisasi sektor publik tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan. Tekanan tersebut sejalan dengan adanya tuntutan yang lebih besar dari masyarakat akan adanya transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik. Hal itu bukanlah tanpa alasan, karena sumber dana yang digunakan dalam aktifitas operasional organisasi sektor publik tersebut merupakan uang negara yang pada dasarnya adalah uang rakyat. Dan sudah menjadi suatu kewajiban bagi organisasi sektor publik untuk melakukan pertanggungjawaban kepada rakyat.

Pertanggungjawaban organisasi sektor publik diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk

melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap perundang-undangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah diperlukan akuntansi khusus untuk instansi pemerintahan, akuntansi tersebut adalah akuntansi pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan undang-undang yang berlaku. Akuntansi pemerintahan terbagi atas Akuntansi Pemerintah Pusat dan Akuntansi Pemerintah Daerah. Di Indonesia, praktek akuntansi pemerintahan diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. SAP disusun dan disahkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Pemerintah Indonesia melalui KSAP pada tanggal 22 Oktober 2010 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, sebagai pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005. Pada SAP ini komponen laporan keuangan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tahun 2015 merupakan tahun yang sangat krusial dalam bidang pelaporan keuangan pemerintah. Hal tersebut karena terjadi perubahan basis akuntansi pada pemerintahan, dari yang sebelumnya menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual berubah menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 bahwa SAP berbasis akrual dilaksanakan empat tahun setelah tahun 2010, yang artinya dilaksanakan pada tahun 2015.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Menurut sistem akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru adalah satu dari lima SMK Kehutanan Negeri yang ada di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pasal 1 menyebutkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK Kehutanan Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pendidikan menengah kejuruan formal di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM). Dan di dalam lingkup

kementerian/ lembaga, SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru merupakan entitas akuntansi setingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran).

Layaknya instansi pemerintahan lainnya, SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru pada tahun 2015 untuk pertama kalinya menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai yang diamanatkan pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010. Sebelumnya, SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual, dimana laporan keuangan yang disusun hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan diterapkannya sistem akuntansi berbasis akrual selain ketiga laporan tersebut, SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru wajib menyusun Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan keuangan SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Seiring dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat, Kementerian Keuangan mengembangkan sistem akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat yang menjadi

pedoman dalam praktek akuntansi berbasis akrual oleh setiap Kementerian Negara/ Lembaga termasuk SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.

Adapun proses akuntansi yang dilakukan pada SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru adalah dengan membuat Buku Kas Umum (BKU) (lampiran 1). Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) bendahara pengeluaran yang kemudian di lampirkan dalam laporan keuangan. BKU hanya digunakan untuk mengetahui posisi saldo kas, sedangkan untuk membuat laporan keuangan, proses akuntansi dimulai dari perekaman dokumen sumber yaitu SP2D yang kemudian diinput ke dalam jurnal transaksi kas (Lampiran 2) dan jurnal transaksi akrual (Lampiran 3). Selanjutnya, dari jurnal transaksi diposting ke buku besar akrual dan buku besar kas, setelah itu dibuatlah jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan pendapatan dan beban akrual. Selanjutnya saldo akhir di buku besar di masukkan ke dalam neraca percobaan. Langkah terakhir adalah menyusun laporan keuangan, untuk neraca percobaan kas (Lampiran 8) akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (Lampiran 10), sedangkan neraca percobaan akrual (Lampiran 9) akan menghasilkan Laporan Operasional (Lampiran 11), Laporan Perubahan Ekuitas (Lampiran 12), dan Neraca (Lampiran 13).

Berdasarkan praktek akuntansi dan data yang diperoleh dari SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, peneliti menemukan beberapa permasalahan, yaitu: di dalam neraca percobaan (akrual) terdapat akun beban berada pada posisi kredit, akun tersebut adalah Beban Keperluan Perkantoran senilai Rp6.510.300

(Lampiran 9). hal itu menyebabkan akun Beban Keperluan Perkantoran bernilai minus pada Laporan Operasional.

Dalam daftar aset tetap semester II tahun 2015 terdapat aset yang langsung disusutkan secara penuh, sehingga aset tersebut bernilai buku Rp0 pada akhir tahun. Aset tersebut adalah Aset Laboratorium Lingkungan Hidup senilai Rp19.900.000 yang dikelompokkan ke dalam aset peralatan dan mesin, aset tersebut diperoleh pada tanggal 20 November 2015, dengan masa manfaat 7 tahun (Lampiran 7). Selain itu terdapat ketidakwajaran dalam penentuan masa manfaat aset tetap, yaitu aset Jaringan Listrik yang memiliki taksiran masa manfaat 40 tahun dengan nilai perolehan Rp13.000.000 (Lampiran 7).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pada SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut:

**“Apakah Penerapan Akuntansi Pada SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru Sudah Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014”**.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 270/PMK.05/2014.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Menambah wawasan penulis yang pada umumnya mengenai bidang ilmu akuntansi dan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik terutama akuntansi pemerintahan, dimana penulis dapat melihat secara langsung praktek akuntansi pemerintahan yang diterapkan di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru.
2. Bagi pihak SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntansi pemerintahan.
3. Bagi pembaca penelitian ini dapat dijadikan wawasan, pengetahuan, referensi, acuan pembanding dan bahan masukan dalam penulisan bagi peneliti lain yang berminat meneliti tema yang sama.

## **D. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian mengenai Penerapan Akuntansi Pada SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, akan dibagi dalam enam bab sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini berisi telaah pustaka dan hipotesis, telaah pustaka berisi penjelasan mengenai pengertian akuntansi, akuntansi sektor publik, akuntansi pemerintahan, teknik akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan, sistem akuntansi, sistem akuntansi pemerintah pusat, sistem akuntansi instansi, dan siklus akuntansi pemerintahan.
- BAB III : Bab ini menjelaskan tentang tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.
- BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, yang meliputi sejarah singkat, struktur organisasi serta visi dan misi.
- BAB V : Bab ini akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan serta menjelaskan hasil pengujian hipotesis.
- BAB VI : Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi, yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran yang diberikan.